



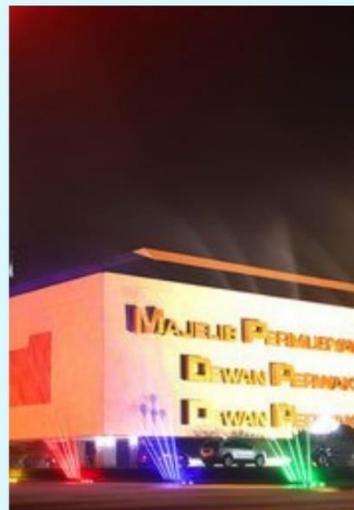
# **BUKU REKOMENDASI PANJA ORGANISASI INTERNASIONAL TAHUN 2025**

**BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**





**BUKU REKOMENDASI  
PANJA  
ORGANISASI  
INTERNASIONAL  
TAHUN 2025**



**Pengarah**

Ravindra Airlangga, B.A., M.S. (Ketua Panitia Kerja Organisasi Internasional)  
Dr. H. Mardani Ali Sera, M.Eng  
Irine Yusiana Roba Putri, S.Sos., M.Comm&MediaSt.  
Muhammad Husein Fadlulloh, B.Bus., M.M., M.B.A.  
Bramantyo Suwondo, M.IR

**Koordinator**

Rijal Al Huda, M.Ec.

**Penyunting**

Miranti Widiani, Beny Rahbandiyosa Sabri

**Penulis**

Tide Aji Pratama, M.Si  
Yachya, M.Si  
Made Fitri Maya Padmi, M.Sc.  
Dr. Farahdina Al Anshori, S.Pd.I., M.Si.

**Riset dan Data**

Naufal Fakhri Erlangga

**Desain Cover & Isi**

Erman Suhendri

**Sekretariat**

Jaka Adiwiguna  
Ratna Tarisa Ekaningtyas  
Sarhani  
Anton Maryono  
Riski Irpanda  
Andirani Elizabeth Sinaga

**Diterbitkan oleh:**

Sekretariat Jenderal DPR RI  
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, 10270

**Dikeluarkan oleh:**

Bagian Sekretariat Kerja Sama Organisasi Internasional  
Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional

Hak Cipta 2025, Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional

The background of the cover is a photograph of a modern building with a large, curved, green roof and a wide, grey staircase. In the foreground, there is a pool of water with a green border. The sky is blue with some white clouds. A large white circle is overlaid on the right side of the image, containing the title text.

**BUKU REKOMENDASI  
PANJA  
ORGANISASI  
INTERNASIONAL  
TAHUN 2025**

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana telah diatur dan diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa;

Kutipan Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama **1 (satu) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak **Rp100.000.000 (seratus juta rupiah)**.
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama **3 (tiga) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)**.
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama **4 (empat) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**.
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama **10 (sepuluh) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak **Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)**.



## KATA PENGANTAR

**P**uji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya dan terselesaikannya seluruh rangkaian kegiatan dari Panitia Kerja (Panja) Organisasi Internasional. Laporan dan rekomendasi terkait organisasi internasional ini kami susun sebagai bagian dari pertanggungjawaban kami dan juga wujud komitmen kami untuk memperkuat kepentingan nasional Indonesia melalui diplomasi parlemen.

Panja Organisasi Internasional dibentuk berdasarkan keputusan Rapat Pimpinan BKSAP pada tanggal 3 Maret 2025. Panja Organisasi Internasional ini juga merupakan bentuk pelaksanaan peran parlemen sebagai lembaga legislatif yang memiliki fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, yang diimplementasikan dengan memastikan bahwa keterlibatan Indonesia dalam organisasi internasional tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga sesuai dengan kepentingan nasional, kedaulatan kebijakan, dan kesejahteraan umum.

Di awal tahun 2025, Indonesia memasuki babak baru dalam memainkan peran dalam komunitas internasional. Pertama, negara ini sedang dalam proses aksesinya bergabung dalam OECD. Kedua, Indonesia juga baru saja diterima sebagai anggota dari BRICS. Hal ini

tentu memberikan posisi strategis bagi bangsa Indonesia yang perlu dimanfaatkan untuk kepentingan nasional dan juga rakyat.

Selama lebih kurang 6 bulan berkegiatan, Panja Organisasi Internasional telah menghimpun masukan dari akademisi, praktisi lokal dan internasional, juga dari Kementerian dan Lembaga terkait melalui *focus group discussion* dan kunjungan kerja ke Kawasan Ekonomi Khusus di Batam. Rekomendasi yang disusun oleh Panitia Kerja ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Komisi dan pihak-pihak terkait dalam penyusunan dan penyelarasan kebijakan nasional dalam menghadapi persaingan internasional.

---

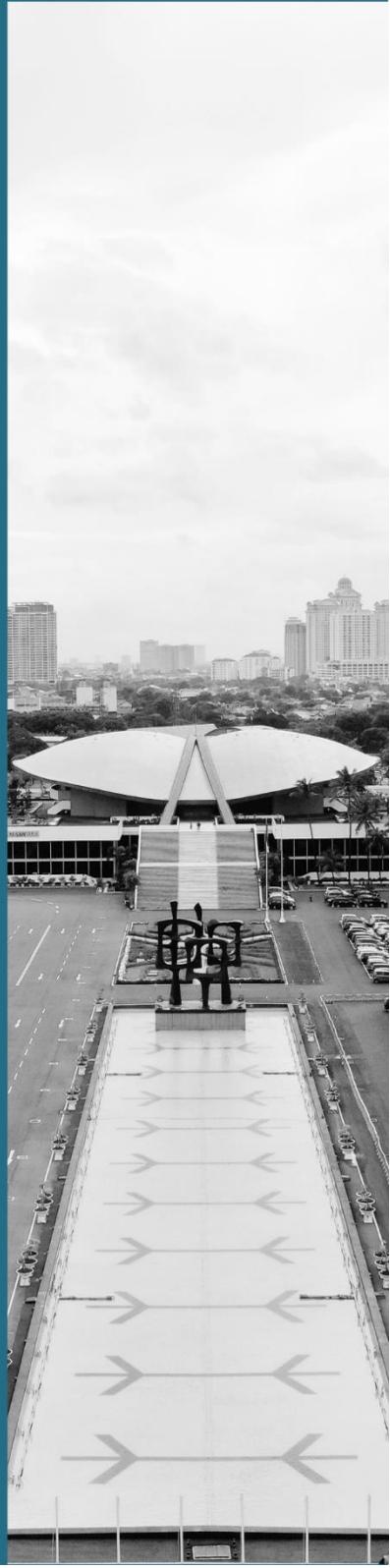
**Ravindra Airlangga**  
Ketua Panja Organisasi Internasional  
BKSAP DPR RI

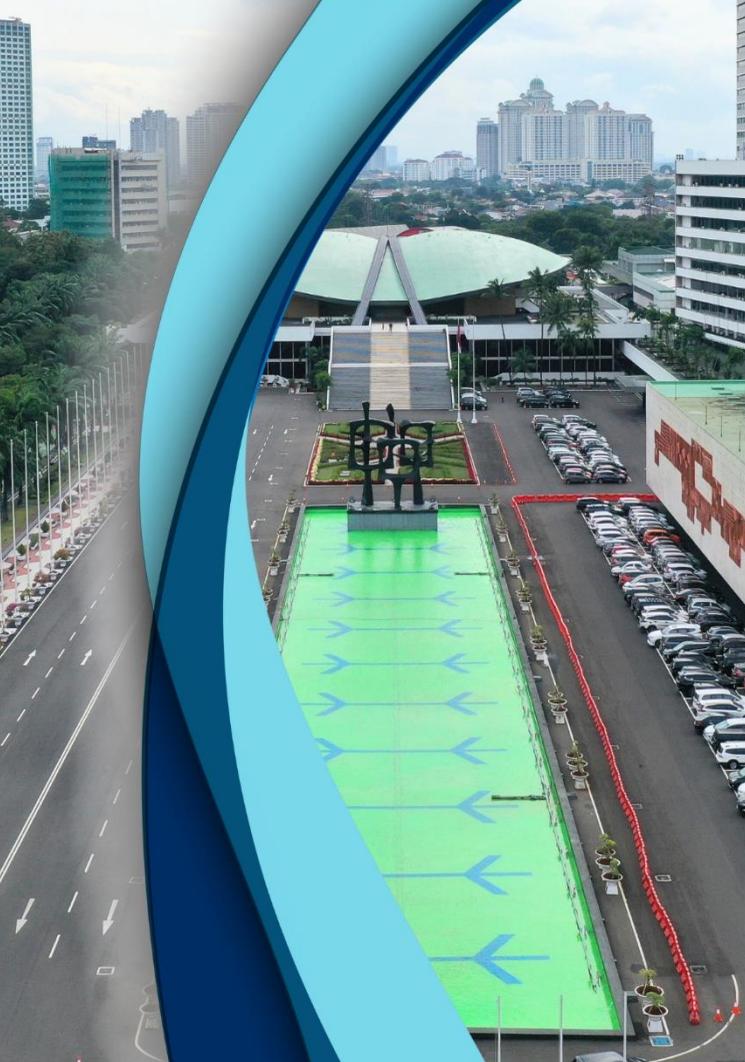
## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	vii
I. Sekilas tentang Panja Organisasi Internasional	1
II. Anggota Panja Organisasi Internasional	9
III. Rekomendasi	13
IV. Kegiatan Panja Organisasi Internasional	
Tahun 2025.....	19
A. Internasional.....	19
1. OECD Global Parliamentary Network.....	19
2. BRICS+ Parliamentary Meeting.....	24
B. Nasional.....	28
1. FGD Panja OI dengan International Conservation Caucus Foundation (ICCF).....	28
2. Focus Group Discussion dengan OECD Indonesia.....	36
3. Focus Group Discussion dengan OECD Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, dan Kementerian Luar Negeri RI.....	41
4. Kunjungan kerja ke BP Batam dan Nongsa Digital Park.....	47
5. Foto Dokumentasi .....	61



# SEKILAS TENTANG PANJA ORGANISASI INTERNASIONAL







## I. SEKILAS TENTANG PANJA ORGANISASI INTERNASIONAL

**D**alam rangka implementasi kebijakan luar negeri bebas aktif untuk mendukung pencapaian kepentingan nasional terutama pertumbuhan ekonomi 8%, Indonesia terus memperkuat posisinya dalam tatanan ekonomi dan politik global melalui keanggotaan di berbagai organisasi internasional. Salah satu langkah yang diambil oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto adalah melalui keanggotaan pada grup ekonomi dan geopolitik BRICS+ (Brazil, Russia, India, China, South Africa, Egypt, Ethiopia, Indonesia, Iran, dan United Arab Emirates) pada 6 Januari 2025. Selain itu, Indonesia juga sedang berproses untuk menjadi anggota (aksesi) Organization for Economic Co-operation and Development (OECD).

Bergabungnya Indonesia ke BRICS dan aksesinya ke OECD dapat dipahami sebagai sebuah strategi penyeimbang antara kedua blok ekonomi tersebut. Antara BRICS dengan mayoritas anggotanya adalah negara-negara berkembang dan OECD yang kebanyakan adalah negara-negara barat. Melalui langkah tersebut, Indonesia ingin untuk memperkuat perannya sebagai kekuatan untuk stabilitas dan pembangunan regional sambil mempertahankan posisinya sebagai jembatan antara *Global South* dan *Global North* untuk mempromosikan perdamaian, kerja sama, dan stabilitas. Di samping tentunya mendapatkan manfaat ekonomi yang sebesar-besarnya dari kedua blok kerja sama ekonomi tersebut.

Sejalan dengan kebijakan bergabungnya pemerintah Indonesia ke BRICS+, di sisi parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) melalui Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) juga menerima undangan untuk bergabung dengan BRICS+ *Parliamentary Forum*. Forum tersebut merupakan wadah dialog dan kerja sama antara parlemen negara-negara anggota BRICS dalam mendiskusikan upaya penguatan kerja sama ekonomi dan politik melalui diplomasi parlemen. Forum ini juga memberikan berbagai pertimbangan dari perspektif parlemen untuk berbagai kebijakan yang akan diadopsi bersama oleh negara-negara anggota BRICS+. Di sisi lain, BKSAP DPR RI juga telah menjadi anggota aktif dari *OECD Global Parliamentary Network*, yang dibentuk dengan tujuan untuk membangun dialog dan kolaborasi multi-level antar parlemen, dalam rangka mewujudkan legislasi yang selaras dengan kebijakan negara-negara anggota OECD. Terutama, dalam konteks jika ada yang perlu diratifikasi oleh parlemen.



Keanggotaan Indonesia dalam BRICS dan OECD membawa peluang besar, termasuk dalam penguatan sektor ekonomi biru. BRICS, melalui mekanisme keuangan seperti *New Development Bank (NDB)*, dapat mendukung investasi dalam sektor maritim, sementara OECD dapat menyediakan standar dan praktik terbaik dalam tata kelola sumber daya kelautan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan *Focus Group Discussion (FGD)* untuk menggali lebih dalam bagaimana peran parlemen dapat mendukung optimalisasi manfaat dari keanggotaan dalam

BRICS dan OECD, khususnya untuk pengembangan ekonomi biru di Indonesia.

Sebagai negara maritim dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, Indonesia memiliki potensi besar dalam ekonomi biru (*blue economy*). DPR RI melalui BKSAP juga bekerjasama dengan Ocean Caucus dari *International Conservation Caucus Foundation (ICCF)* dalam memastikan pemanfaatan peluang global serta penguatan kebijakan nasional, seperti keanggotaan Indonesia di BRICS+ dan OECD, sejalan dengan kepentingan nasional yang optimal dan berkelanjutan. ICCF memberikan pandangan mendalam tentang konsep dan tujuan *White Paper* tentang Ekonomi Biru yang dipimpin oleh Ocean Caucus.

“

---

Keanggotaan Indonesia dalam BRICS dan OECD membawa peluang besar, termasuk dalam penguatan sektor ekonomi biru.

”

---

OECD maupun BRICS+, sama-sama memberikan peluang ekonomi baru, baik dalam lingkup kerja sama dengan Global South melalui BRICS, ataupun *Global North* melalui OECD. Isu utama yang perlu dikaji dari bergabungnya Indonesia ke BRICS dan akses OECD adalah, bagaimana Indonesia dapat menyeimbangkan kepentingan nasionalnya dengan penyesuaian struktural yang diperlukan baik terhadap rencana akses OECD sesuai dengan peta jalan akses yang telah disediakan, maupun terhadap sejumlah rencana strategis ekonomi BRICS+ melalui *New Development Bank (NDB)*.

Indonesia juga harus menyesuaikan sejumlah kebijakan utamanya dalam bidang perdagangan, perpajakan, anti-korupsi,

dan keberlanjutan lingkungan, termasuk dalam pengaturan administrasinya. Sejumlah penyesuaian ini juga memiliki konsekuensi di sisi legislatif yaitu perlunya perubahan atau penyusunan legislasi baru. Baik BRICS maupun OECD sesungguhnya adalah strategi Indonesia untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang diperlukan, dan bukan untuk saling dipertentangkan antara satu dengan lainnya. Namun, baik dalam konteks BRICS+ maupun OECD, DPR RI perlu berperan aktif sesuai tugas-tugas dan wewenangnya sebagai lembaga perwakilan rakyat (legislasi, anggaran, pengawasan, yang disertai diplomasi parlemen), untuk memastikan bahwa bergabungnya Indonesia ke BRICS+ dan aksesi OECD, tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga tetap sejalan dengan kepentingan nasional, kedaulatan kebijakan, dan kesejahteraan rakyat.

“

---

DPR memastikan, bergabungnya Indonesia ke BRICS+ dan aksesi OECD, tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga tetap sejalan dengan kepentingan nasional, kedaulatan kebijakan, dan kesejahteraan rakyat.

”

---

Oleh karena itu, BKSAP merasa perlu untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) Organisasi Internasional guna mendalami kedua blok kerja sama ekonomi tersebut. Pendalaman hubungan dengan BRICS+ memberikan peluang bagi Indonesia untuk dapat memperkuat kerja sama Selatan-Selatan, mendiversifikasi investasi dan perdagangan, serta mengurangi ketergantungan pada lembaga keuangan yang didominasi negara-negara Barat. Lebih jauh, BKSAP sebagai pelaksana diplomasi parlemen juga

perlu mengkaji undangan bagi DPR RI untuk bergabung pada BRICS+ *Parliamentary Forum*. Sedangkan aksesi Indonesia sebagai anggota penuh OECD merupakan langkah untuk memperkuat peran global serta tata kelola kebijakan nasional agar sesuai standar internasional. Hal ini penting, jika Indonesia ingin menjadi mitra dagang strategis negara-negara OECD dan ingin mendapatkan akses ke pasar mereka.



Bergabungnya Indonesia ke BRICS+ dan aksesi Indonesia ke OECD juga menimbulkan pertanyaan penting terkait kedaulatan regulasi dan legislasi, terutama terkait dengan apakah aksesi OECD akan berakibat pada sejumlah penyesuaian peraturan perundang-undangan dan regulasi lainnya, serta bagaimana keterlibatan dalam BRICS+ maupun BRICS+ *Parliamentary Forum*, dapat membawa manfaat yang maksimal bagi rakyat dan pada saat yang bersamaan harus dapat dipastikan tetap selaras dengan prinsip kehati-hatian fiskal dan tata kelola anggaran negara. Untuk menelaah dan mengkaji secara menyeluruh terhadap hal-hal ini, maka BKSAP merasa perlu untuk membentuk sebuah Panitia Kerja (Panja) Organisasi Internasional.

Panja Organisasi Internasional dibentuk karena urgensi strategis Indonesia dalam proses aksesi OECD dan keanggotaan barunya di BRICS+. Kedua organisasi ini berpengaruh besar terhadap kebijakan nasional. Meskipun Indonesia telah aktif dalam

berbagai inisiatif OECD, belum ada strategi komprehensif untuk akses penuh, sementara keanggotaan tetap di BRICS yang baru diperoleh memerlukan akselerasi peran dan sinkronisasi dengan strategi nasional.

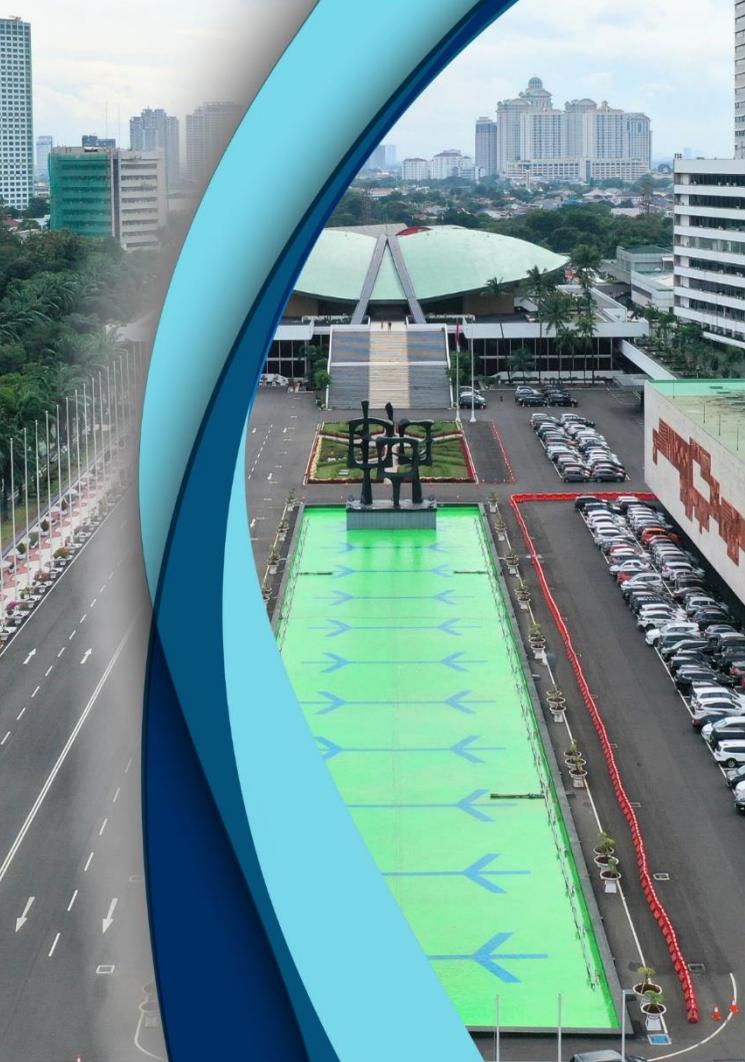
Oleh karena itu, pembentukan Panja Organisasi Internasional oleh BKSAP memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Mengkaji kesiapan Indonesia dalam memenuhi persyaratan keanggotaan OECD dan BRICS+, termasuk reformasi regulasi dan kelembagaan yang diperlukan;
2. Menganalisis dampak ekonomi, keuangan, dan geopolitik dari akses penuh OECD, serta konsekuensinya terhadap daya saing nasional dan hubungan internasional;
3. Mengidentifikasi perubahan regulasi yang diperlukan agar kebijakan nasional tetap selaras dengan standar OECD dan integrasi ekonomi dalam BRICS+;
4. Meningkatkan koordinasi lintas kementerian serta hubungan dengan mitra internasional dalam proses akses;
5. Mengawasi tata kelola ekonomi biru Indonesia dalam keanggotaan OECD dan BRICS+ melalui kerjasama dengan ICCF.



# ANGGOTA PANJA ORGANISASI INTERNASIONAL







## II. ANGGOTA PANJA ORGANISASI INTERNASIONAL

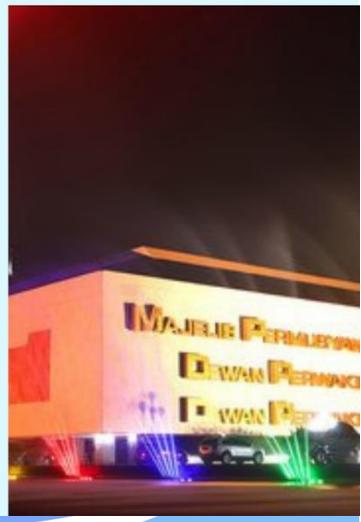
NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA	FRAKSI	KOM	KET
1.	RAVINDRA AIRLANGGA, B.A., M.S.	A-300	PG	IX	KETUA PANJA
2.	Dr. H. MARDANI ALI SERA, M.Eng.	A-422	PKS	II	ANGGOTA PANJA
3.	IRINE YUSIANA ROBA PUTRI, S.Sos., M.Comm&MediaSt.	A-258	PDI-P	V	ANGGOTA PANJA
4.	MUHAMMAD HUSEIN FADLULLOH, B.Bus., M.M., M.B.A.	A-105	P. GERINDRA	VI	ANGGOTA PANJA
5.	BRAMANTYO SUWONDO, M.IR	A-557	PD	X	ANGGOTA PANJA
6.	GILANG DHIELAFARAREZ, S.H., LL.M.	A-192	PDI-P	III	ANGGOTA PANJA
7.	CHARLES HONORIS	A-176	PDI-P	IX	ANGGOTA PANJA
8.	DONY MARYADI OEKON, S.T.	A-188	PDI-P	XII	ANGGOTA PANJA
9.	DEDE INDRA PERMANA SOEDIRO, S.H.	A-210	PDI-P	III	ANGGOTA PANJA
10.	GALIH DIMUNTUR KARTASAMITA	A-306	PG	XI	ANGGOTA PANJA
11.	ABRAHAM SRIDJAJA, S.H., M.H.,C.L.A	A-291	PG	I	ANGGOTA PANJA
12.	Dr. Hj. ADDE ROSI KHOERUNNISA, S.SOS., M.Si	A-336	PG	X	ANGGOTA PANJA
13.	TRINOVI KHAIRANI, B.A.	A-271	PG	I	ANGGOTA PANJA

<b>NO</b>	<b>N A M A</b>	<b>NOMOR ANGGOTA</b>	<b>FRAKSI</b>	<b>KOM</b>	<b>KET</b>
14.	G. BUDISATRIO DJIWANDONO	A-142	P. GERINDRA	I	ANGGOTA PANJA
15.	RAHAYU SARASWATI D. DJOJHADIKUSUMO	A-90	P. GERINDRA	VII	ANGGOTA PANJA
16.	RUBY CHAIRANI SYIFFADIA, B.A., (Hons)., M.Sc	A-83	P. GERINDRA	X	ANGGOTA PANJA
17.	AMELIA ANGGRAINI	A-394	P. NASDEM	I	ANGGOTA PANJA
18.	ANDINA THRESIA NARANG, B.Com	A-415	P. NASDEM	I	ANGGOTA PANJA
19.	Drs. H. ANDI MUAWIYAH RAMLY, M.Si.	A-66	PKB	X	ANGGOTA PANJA
20.	Dr. Hj. ARZETI BILBINA SETYAWAN, S.E., M.A.P.	A-39	PKB	IX	ANGGOTA PANJA
21.	ELPISINA, S.Sos., M.Si.	A-8	PKB	XII	ANGGOTA PANJA
22.	H. SYAHRUL AIDI MA'AZAT, L.C., M.A . (Kapokdan)	A-442	PKS	V	ANGGOTA PANJA
23.	SURYA UTAMA, S.I.P.	A-500	PAN	IX	ANGGOTA PANJA
24.	Dr. drh. Hj. DEWI CORYATI, M.Si.	A-496	PAN	X	ANGGOTA PANJA
25.	Dr. HILLARY BRIGITA LASUT, S.H., LL.M	A-557	PD	XI	ANGGOTA PANJA



# REKOMENDASI







### III. REKOMENDASI

Panja OI mengarusutamakan fokus dan kerjanya tidak hanya spesifik dalam kegiatan Panja dengan organisasi yang ada tetapi juga dalam interaksi BKSAP dengan IGO (*International Government Organization*) terkait. Panja Organisasi Internasional telah ikut serta dalam sidang OECD *Parliamentary Network* dan BRICS *Parliamentary Forum*, Focus Group Discussion mengenai OECD serta kunjungan ke Kawasan Ekonomi Khusus. Adapun beberapa kegiatan dan interaksi Panja OI dan BKSAP dengan IGO pada 2025 tercatat sebagai berikut:

1. OECD Global Parliamentary Network (GPN) 2025, 5–7 Februari 2025 di OECD Conference Centre, Paris, Perancis
2. BRICS+ *Parliamentary Meeting*, 3-5 Juni 2025 di Brasilia, Brazil
3. FGD Panja OI dengan *International Conservation Caucus Foundation* (ICCF): *Role on Supporting Indonesia's Membership in BRICS and Accession to OECD*, 18 Maret 2025, Jakarta
4. *Focus Group Discussion* dengan OECD Indonesia, 5 Mei 2025, Jakarta
5. *Focus Group Discussion* dengan OECD Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, dan Kementerian Luar Negeri RI, 26 Juni 2025, Jakarta

6. Kunjungan kerja ke BP Batam dan Nongsa Digital Park, 1-3 Juli 2025, Batam.

Selain interaksi dengan IGO, Panja juga melakukan telaah singkat dalam kaitannya dengan Peraturan Presiden (Perpres) No 30/2019 tentang Keanggotaan dan Kontribusi Indonesia pada Organisasi Internasional. Keikutsertaan Panja tersebut telah menghasilkan rekomendasi sebagai berikut:

1. DPR RI, melalui BKSAP dapat mengoptimalkan diplomasi parlemen pada forum-forum internasional seperti OECD *Global Parliamentary Network* dan BRICS *Parliamentary Forum*, sebagai media untuk menyuarakan kepentingan nasional Indonesia, khususnya yang terkait dengan OECD maupun BRICS.

Hasil OECD *Global Parliamentary Network* 2025, BRICS *Parliamentary Forum*, dan setiap agenda parlemen negara-negara OECD dan BRICS selanjutnya, disampaikan kepada Alat Kelengkapan Dewan terkait di DPR RI untuk ditindaklanjuti sesuai tugas dan kewenangannya.

2. DPR RI, melalui Alat Kelengkapan Dewan yang ditunjuk dalam Rapat Pimpinan DPR RI, berkoordinasi dengan OECD dalam rangka penguatan regulasi nasional yang selaras dengan ketentuan akses Indonesia ke OECD dan melaksanakan peningkatan kapasitas yang melibatkan Kementerian/Lembaga terkait serta OECD.

Rapat Pimpinan DPR RI juga perlu mengagendakan koordinasi resmi dengan seluruh fraksi untuk menyepakati langkah Bersama dalam menindaklanjuti rekomendasi Panja Organisasi Internasional terkait OECD dan BRICS. Fraksi-fraksi kemudian menugaskan anggotanya di alat kelengkapan dewan yang terkait untuk secara aktif mengawal harmonisasi legislasi, fungsi pengawasan, dan diplomasi parlemen yang selaras dengan kepentingan nasional dalam kerangka OECD dan BRICS.

Rapat Pimpinan DPR RI juga diperlukan untuk memfasilitasi rapat gabungan antara BKSAP dan alat kelengkapan dewan terkait sebagai forum sinkronisasi agenda kerja dan pembahasan isu lintas sektor yang memerlukan keterlibatan berbagai alat kelengkapan dewan.

3. DPR RI dapat melakukan pengawasan menyeluruh terhadap bagaimana pemerintah memanfaatkan forum-forum seperti OECD dan BRICS untuk mencapai kepentingan nasional. Untuk OECD, DPR RI melalui Komisi-komisi yang relevan dapat mengawasi bagaimana penyelarasan regulasi dalam rangka proses aksesi OECD dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan untuk BRICS Parliamentary Forum, DPR RI melalui BKSAP dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian/Lembaga terkait mengenai kepentingan nasional Indonesia yang perlu di amplifikasi melalui diplomasi parlemen.
4. Pemerintah, terkait dengan proses aksesi Indonesia ke OECD, perlu memperhatikan beberapa hal seperti; memastikan supremasi hukum dan perlindungan HAM, mengupayakan keterbukaan dalam proses aksesi, serta mengantisipasi dampak proses aksesi terhadap kebijakan nasional dan kesejahteraan rakyat. Selain itu, pemerintah perlu fokus pada penguatan tata kelola, peningkatan produktivitas, dan pemanfaatan digitalisasi, serta mengatasi kesenjangan dalam berbagai aspek.

Khusus mengenai dampak dari proses penyesuaian Undang-Undang, regulasi dan kebijakan nasional dengan standar OECD, terutama yang berkaitan langsung terhadap kedaulatan nasional, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, pemerintah agar berkomunikasi dan berdiskusi aktif dengan komisi-komisi terkait di DPR RI.

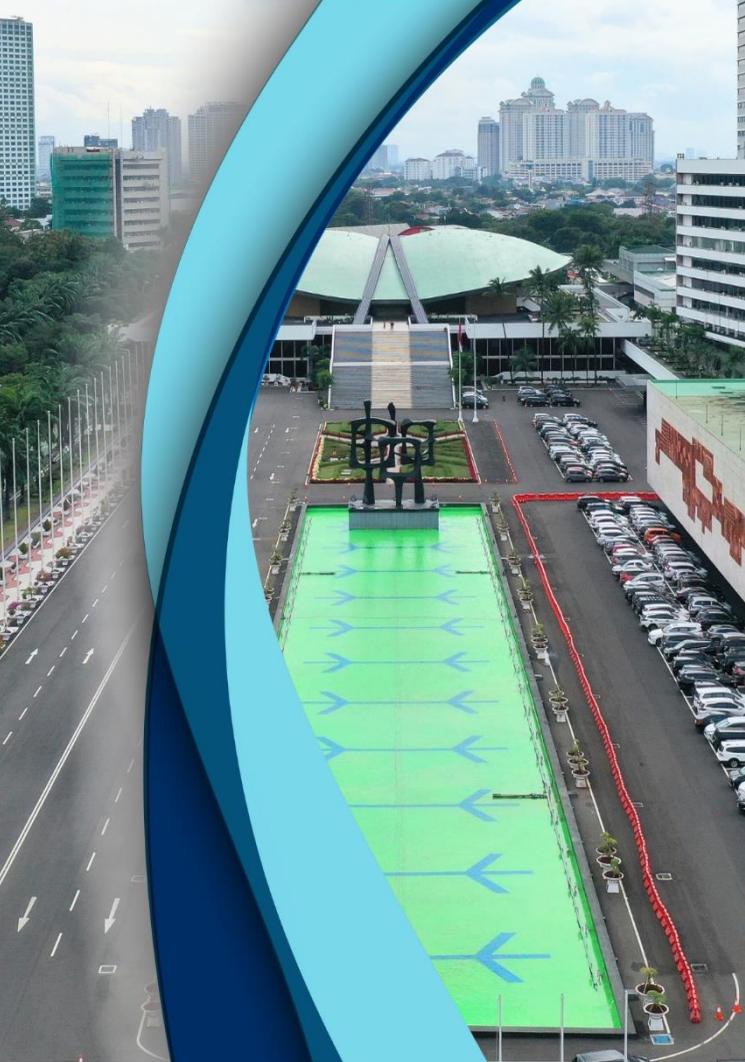
5. Pemerintah, mengenai keanggotaan Indonesia di BRICS, perlu mengantisipasi sejauh mana BRICS dapat

mempengaruhi Indonesia baik secara politik maupun ekonomi. Pemerintah juga perlu memperkuat daya tawar Indonesia dengan melakukan sejumlah hal seperti; 1) Memperkuat daya saing domestik melalui peningkatan investasi, pengembangan sumber daya manusia dan Pembangunan infrastruktur. 2) Menjaga keseimbangan hubungan luar negeri dengan tetap konsisten pada prinsip Politik Luar Negeri Bebas Aktif, mengoptimalkan diplomasi melalui BRICS untuk memperjuangkan kepentingan nasional dan kepentingan negara-negara berkembang. 3) Memanfaatkan keanggotaan di BRICS untuk mengangkat daya tawar Indonesia di panggung politik global misalnya melalui agenda reformasi tata Kelola global



# KEGIATAN PANJA ORGANISASI INTERNASIONAL TAHUN 2025







## IV. KEGIATAN PANJA ORGANISASI INTERNASIONAL TAHUN 2025

Untuk mencapai maksud dan tujuan pembentukan yang telah dijelaskan di atas, Panja Organisasi Internasional telah menghadiri beberapa sidang internasional dan melaksanakan sejumlah program kerja berupa *Focus Group Discussion* (FGD) dan kunjungan dalam negeri yang berkaitan dengan keanggotaan Indonesia pada BRICS+ dan OECD.

### A. Internasional

#### 1. OECD Global Parliamentary Network

OECD Global Parliamentary Network (GPN) adalah wadah pembelajaran legislatif yang dibentuk pada 2011 untuk para legislator dan pejabat parlemen. Dengan struktur yang fleksibel, jaringan ini memungkinkan anggota parlemen dari berbagai spektrum politik untuk saling berbagi pengalaman, mengidentifikasi praktik terbaik, dan memperkuat kerja sama legislatif internasional.

Melalui forum ini, para anggota mendapatkan manfaat dari rekomendasi OECD yang terkait dengan isu-isu yang mereka hadapi, sekaligus sebagai kesempatan bertemu dan berdiskusi dengan rekan sejawat maupun pakar guna membandingkan pengalaman dan mencari solusi yang efektif. Jaringan ini menempatkan anggota parlemen di garis depan mengenai berbagai isu kebijakan, serta membuka ruang kolaborasi dalam

menghadapi isu-isu prioritas dalam agenda legislatif pada masing-masing negara.

Pertemuan OECD Global Parliamentary Network tahun ini berlangsung pada tanggal 5–7 Februari 2025 di OECD *Conference Centre*, Paris, Perancis. Kegiatan ini dihadiri hampir 140 anggota parlemen dan 45 pejabat parlemen dari lebih dari 40 negara, yang memungkinkan pertukaran informasi antara anggota parlemen dari beragam perspektif.



Rapat Pleno 2025 mencakup berbagai sesi, mulai dari pertemuan bilateral dengan meja ekonomi negara-negara OECD, pembahasan Strategi Pembangunan OECD, hingga topik-topik strategis seperti perubahan iklim, kecerdasan buatan, energi, ekonomi global, pergeseran demografi, Survei Keterampilan Orang Dewasa OECD, dan kebijakan persaingan.

Diskusi dimulai dengan pembahasan prospek ekonomi global yang dipaparkan oleh Kepala Ekonom OECD, Alvaro S. Pereira. OECD memproyeksikan pertumbuhan PDB global mencapai 3,3% pada 2025, meningkat dari 3,2% di 2024, dengan inflasi menurun dari 5,4% menjadi 3,8%. Meski pasar tenaga kerja mulai longgar, tantangan

geopolitik, inflasi yang terjadi terus menerus, dan ketidakpastian pasar keuangan tetap menjadi risiko utama. Delegasi DPR RI menyoroti keselarasan target ekonomi Indonesia sebesar 5,2% di 2025 dengan strategi kebijakan campuran untuk menjaga stabilitas ekonomi.

Topik perubahan iklim menjadi fokus utama dalam dua sesi, yakni adaptasi dan ketahanan iklim, serta mitigasi dan transisi menuju *net-zero*. OECD memaparkan langkah-langkah adaptasi iklim dan dukungan terhadap negara-negara anggota dan non-anggota. Delegasi DPR RI, Adde Rossi Khoerunnisa, menegaskan komitmen Indonesia dalam mendukung perjanjian internasional seperti COP 29 di Baku dan mendorong pemenuhan pendanaan iklim. Pada sisi mitigasi, Wakil Ketua BKSAP, Bramantyo Suwondo, menggarisbawahi pentingnya kerja sama internasional, pemanfaatan energi terbarukan, dan pembangunan ekosistem kendaraan listrik. Indonesia menargetkan porsi energi terbarukan sebesar 23% pada 2025 dengan investasi besar di sektor energi hijau.

“

---

Delegasi BKSAP menegaskan komitmen Indonesia dalam mendukung perjanjian internasional seperti COP 29 di Baku dan mendorong pemenuhan pendanaan iklim.

”

---

Pembahasan strategi pembangunan OECD (*OECD Development Strategy*) menekankan pentingnya inklusi negara berkembang dalam perencanaan dan implementasi kebijakan. Indonesia mendorong agar strategi baru OECD mengacu pada Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan menyediakan akses setara untuk bantuan teknis di bidang transisi energi, ekonomi hijau, pembiayaan berkelanjutan, dan transformasi digital.

Sesi mengenai keterampilan di dunia yang terus berubah menyoroiti peran literasi, numerasi, dan pemecahan masalah adaptif bagi orang dewasa di tengah kemajuan teknologi dan AI. Indonesia telah menetapkan peta jalan pendidikan 2025–2045 untuk meningkatkan daya saing melalui pendidikan vokasi dan program peningkatan keterampilan seperti Kartu Pra-Kerja.

“

---

Partisipasi DPR RI dalam OECD GPN 2025 menunjukkan peran aktif Indonesia dalam diskusi mengenai kebijakan global lintas sektor

”

---

Isu AI dibahas dari dua perspektif, yaitu tata kelola di sektor publik dan dampaknya di dunia kerja. OECD memaparkan potensi AI untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan, namun juga risiko yang perlu diantisipasi. Indonesia menyoroiti bahaya senjata otonom berbasis AI dan pentingnya pembentukan Komite Masa Depan di parlemen. Dalam konteks ketenagakerjaan, Indonesia menekankan perlunya mengatasi kesenjangan kapasitas antarnegara dan tengah membahas RUU Keamanan Siber untuk memperkuat perlindungan dari ancaman AI.

Perubahan demografi juga menjadi sorotan, dengan tantangan penuaan populasi dan rendahnya angka kelahiran di negara-negara OECD. Indonesia, yang masih menikmati bonus demografi, memprioritaskan

kebijakan lintas sektor untuk meningkatkan kualitas SDM, kesehatan, dan kebijakan lansia yang mendukung produktivitas di usia lanjut.

Tren pasar energi global dibahas oleh *International Energy Agency* (IEA), menyoroti ketidakpastian akibat transisi energi, harga minyak, dan geopolitik. Indonesia merespons dengan diversifikasi sumber energi dan pembahasan RUU Energi Baru dan Terbarukan untuk memperkuat pengembangan energi ramah lingkungan.

Kebijakan persaingan dipandang sebagai kunci untuk mendorong inovasi dan melindungi konsumen. Indonesia menegaskan komitmennya melalui UU Persaingan Usaha dan UU Cipta Kerja, serta mendorong kerja sama internasional di bidang penegakan hukum persaingan lintas batas.



Sesi khusus aksesasi OECD mempertemukan negara anggota dan calon anggota untuk bertukar pengalaman. Indonesia menegaskan kesiapan parlemen dalam mendukung peta jalan aksesasi yang telah disahkan pada awal 2024. Beberapa negara, seperti Kosta Rika, Rumania, Kroasia, Latvia, Lithuania, dan Peru, berbagi pelajaran berharga dari proses aksesasi mereka, termasuk

pentingnya komitmen politik, koordinasi kelembagaan, reformasi legislatif, dan keterlibatan publik.

Partisipasi DPR RI dalam OECD GPN 2025 menunjukkan peran aktif Indonesia dalam diskusi mengenai kebijakan global lintas sektor. Melalui forum ini, Indonesia tidak hanya berkontribusi dalam penyusunan kebijakan internasional, tetapi juga memanfaatkan kesempatan untuk memperkuat regulasi domestik, memperluas jaringan kerja sama, dan memastikan bahwa proses aksesasi OECD memberikan manfaat optimal bagi kepentingan nasional.

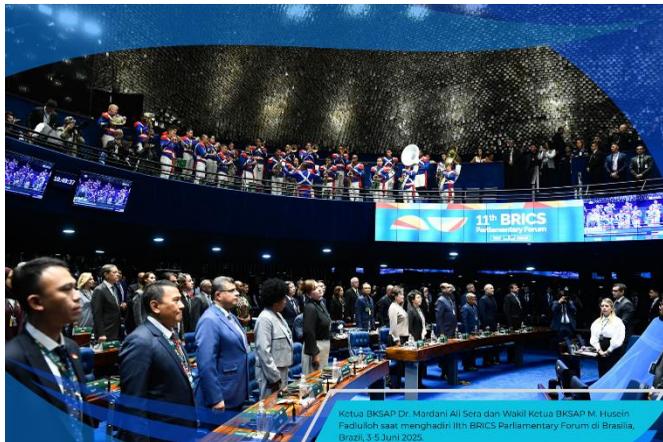
## 2. BRICS+ Parliamentary Meeting

BRICS (Brasil, Rusia, India, China, South Africa) adalah kelompok negara berkembang yang memiliki peran besar dalam perekonomian global. Kelompok BRICS saat ini menjadi simbol kekuatan ekonomi baru sebagai penyeimbang dominasi negara Barat dalam tatanan ekonomi dunia. Sejalan dengan bergabungnya Indonesia sebagai anggota tetap BRICS pada 6 Januari 2025, DPR RI untuk pertama kali menghadiri pertemuan tahunan BRICS *Parliamentary Forum* yang diadakan pada tanggal 3-5 Juni 2025 di Brasilia, Brazil. Pertemuan BRICS Parliamentary Forum yang ke-11 tersebut dihadiri oleh parlemen dari Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan, serta negara-negara seperti Indonesia, Iran, Uni Emirat Arab, Nigeria, Ethiopia, Kuba, Bolivia, dan Mesir.

Forum ini menjadi ajang pertukaran pengalaman dan *best practices*, di mana para delegasi tidak hanya menyampaikan posisi nasional tetapi juga mencari titik temu dalam menghadapi tantangan global seperti perlambatan ekonomi, ketidakpastian geopolitik,

perubahan iklim, dan revolusi teknologi. Seluruh pembahasan diarahkan untuk memperkuat kerja sama ekonomi, politik, dan sosial antarnegara anggota, serta mendorong pembentukan tatanan dunia yang lebih adil, inklusif, dan seimbang.

Forum ini menghasilkan Deklarasi Bersama yang menegaskan komitmen negara anggota BRICS dan mitra untuk memperjuangkan multilateralisme sejati, menghapus hambatan perdagangan yang tidak adil, dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan kesetaraan gender dan keberlanjutan lingkungan. Deklarasi tersebut juga menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor, mulai dari penguatan perdagangan dan investasi, pemanfaatan teknologi, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, hingga kolaborasi dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia.



Ketua BKSAP Dr. Mardani Ali Sera dan Wakil Ketua BKSAP M. Husain Fadlulloh saat menghadiri 11th BRICS Parliamentary Forum di Brasilia, Brazil, 3-5 Juni 2025.

Bagi Indonesia, keanggotaan BRICS membuka peluang strategis yang luas. Di sektor ekonomi, ini berarti akses ke pasar baru, peluang kemitraan investasi, serta sumber pembiayaan infrastruktur melalui *New*

*Development Bank* (NDB) yang lebih fleksibel dibandingkan lembaga keuangan tradisional. Secara politik, Indonesia kini memiliki platform yang lebih kuat untuk mempengaruhi arah kebijakan global, memperjuangkan reformasi institusi multilateral, dan membangun koalisi negara-negara berkembang dalam memperjuangkan kepentingannya.



Dalam sesi perdagangan, Indonesia mendorong peningkatan perdagangan intra-BRICS melalui penggunaan mata uang lokal guna mengurangi ketergantungan pada mata uang tertentu yang berpotensi menimbulkan risiko gejolak nilai tukar. Delegasi DPR RI juga menekankan pentingnya penguatan ketahanan ekonomi kolektif melalui diversifikasi perdagangan dan kerja sama rantai pasok.

Pada sesi investasi dan teknologi, Indonesia menyoroti perlunya alih teknologi di sektor energi terbarukan, pertanian modern, dan hilirisasi industri. Kolaborasi dengan Brasil di sektor pertanian, India di teknologi informasi, dan Tiongkok di manufaktur dipandang dapat meningkatkan daya saing industri nasional. Delegasi

juga menekankan bahwa hilirisasi sumber daya alam memerlukan dukungan teknologi mutakhir yang dapat diakses melalui kemitraan strategis di BRICS.

Di bidang kesehatan global, Indonesia menyambut baik inisiatif BRICS untuk memberantas penyakit tropis terabaikan dan penyakit yang ditentukan secara sosial. Kerja sama ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, terutama dalam mengurangi kemiskinan, kelaparan, dan ketimpangan akses layanan kesehatan. Indonesia memandang kesehatan sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan dan menekankan perlunya berbagi teknologi medis, kapasitas penelitian, dan fasilitas produksi obat.

Pembahasan terkait kecerdasan buatan (AI) menjadi salah satu topik yang paling dinamis. Indonesia menegaskan komitmen terhadap pengembangan AI yang etis, inklusif, dan selaras dengan hak asasi manusia. Delegasi mengingatkan akan bahaya disinformasi, potensi bias algoritma, dan risiko penggunaan AI di sektor militer, serta mendorong kolaborasi internasional untuk menyusun norma dan tata kelola AI yang aman, transparan, dan dapat dipercaya.

“

---

Seluruh pembahasan diarahkan untuk memperkuat kerja sama ekonomi, politik, dan sosial antarnegara anggota, serta mendorong pembentukan tatanan dunia yang lebih adil, inklusif, dan seimbang.

”

---

Dalam isu reformasi perdamaian dan keamanan global, Indonesia memandang reformasi Dewan Keamanan

PBB sebagai keharusan. Delegasi menegaskan perlunya perwakilan yang lebih seimbang antara negara maju dan berkembang, pembatasan penggunaan hak veto, dan penguatan mekanisme Sidang Umum PBB untuk menanggapi situasi darurat internasional. Indonesia juga mendorong BRICS untuk memainkan peran lebih aktif dalam pencegahan konflik, rekonstruksi pascakonflik, dan penegakan hukum internasional.

Secara keseluruhan, partisipasi DPR RI pada BRICS Parliamentary Forum ke-11 mencerminkan keseriusan Indonesia untuk berperan sebagai penghubung antara BRICS dan kawasan Asia Tenggara, sekaligus sebagai suara negara berkembang dalam percaturan global. Keterlibatan aktif ini diharapkan dapat memberikan manfaat konkret, baik dalam bentuk kerja sama ekonomi dan teknologi, maupun kontribusi pada perdamaian dan stabilitas dunia.

## B. Nasional

### 1. FGD Panja OI dengan *International Conservation Caucus Foundation (ICCF): Role on Supporting Indonesia's Membership in BRICS and Accession to OECD*

Dalam perkembangan diplomasi parlemen, BKSAP DPR RI bekerja sama dengan *International Conservation Caucus Foundation (ICCF)*. ICCF adalah lembaga non-profit di level global yang memberdayakan dan menjangkau anggota parlemen dan mendukung legislasi yang tidak hanya baik untuk planet, tetapi juga ekonomi dan komunitas lokal. ICCF diawali di Kongres Amerika Serikat pada 2006 dan menjadi salah satu kelompok bipartisan terbesar di parlemen tersebut. ICCF memiliki

misi untuk memajukan tata kelola konservasi dengan membangun *political will*, menyediakan solusi bumi.

Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 termaktub bahwa target kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) maritim diharapkan sebesar 15% atau setara dengan US\$ 7,4 triliun hingga US\$ 9,8 triliun. Kendati demikian, target tersebut tidak boleh mendorong bangsa ini terjatuh ke konsep ekonomi kelautan (*ocean economy*) yang sangat memprioritaskan keuntungan atau pertumbuhan ekonomi saja, namun Indonesia harus memastikan target tersebut sejalan dengan kerangka ekonomi biru, yaitu sebuah konsep yang mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan untuk meningkatkan ekonomi, menjaga ekosistem laut dan lingkungan, dan memperbaiki kehidupan masyarakat atau memerangi kemiskinan. Komitmen harus dibangun dengan konsep ekonomi biru, agar di masa depan bisa melangkah lebih jauh menuju ekonomi biru regeneratif (*regenerative blue economy*), yaitu konsep ekonomi yang bertujuan memulihkan dan meningkatkan ekosistem laut dengan tetap berfokus kepada kemakmuran ekonomi.

DPR melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan kebijakan anggarannya, sementara BKSAP sebagai penjuror diplomasi parlemen, mendukung penuh realisasi penerapan ekonomi biru di Indonesia. Hal ini terutama untuk memastikan berjalannya Peta Jalan Ekonomi Biru Indonesia dari tahun 2023 hingga 2045 sejalan dengan agenda kawasan dan global.

DPR melalui kewenangan legislasi, pengawasan, dan kebijakan anggarannya, sementara BKSAP sebagai penjuror diplomasi parlemen, mendukung penuh realisasi penerapan ekonomi biru di Indonesia terutama untuk

memastikan berjalannya Peta Jalan Ekonomi Biru Indonesia dari tahun 2023 hingga 2045 sejalan dengan agenda kawasan dan global.

Dalam perjalanan kerja samanya, ICCF dan BKSAP DPR mencoba berkolaborasi secara efektif dan efisien demi percepatan target dan program kerja yang telah disusun. Di antara program tersebut adalah dengan pembentukan Kaukus Kelautan.



Foto bersama Pimpinan dan Anggota Panja Organisasi Internasional BKSAP DPR RI dengan narasumber dan peserta FGD kerja sama dengan ICCF di Tangerang 18 Maret 2023.

Beberapa anggota Kaukus Kelautan yang berasal dari BKSAP sejak periode 2019-2024 adalah Putu Supadma Rudana (Wakil Ketua BKSAP) dan Ravindra Airlangga (anggota BKSAP). Keanggotaan ini dilanjutkan kembali di periode 2024-2029 oleh Ravindra Airlangga selaku Wakil Ketua BKSAP. Mengikuti konteks inilah, BKSAP-ICCF mengadakan FGD. Kaukus Kelautan perlu ditempatkan sebagai kontribusi penting dalam upaya menyokong kristalisasi ekonomi biru di Indonesia, yang tertuang dalam *white paper on blue economy*. FGD ini merupakan inisiasi dalam kerangka menggali pemahaman mendalam, mempromosikan kesadaran

publik, membangun jaringan dan kolaborasi lebih kuat dalam kerangka perumusan *white paper* tersebut.

Lebih lanjut, elemen penting yang tidak boleh dilupakan adalah fakta bahwa ekonomi biru merupakan agenda global yang berkaitan erat dengan pencapaian SDGs Target Nomor 14, yaitu Kehidupan di Bawah Air, yang bertujuan untuk melestarikan dan menggunakan laut, samudra, dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan ekonomi laut yang berkelanjutan pada tahun 2030. Sejauh ini, kemajuan dalam mencapai tujuan ini masih sangat terbatas.

BKSAP dengan dua panja yang dimilikinya, yaitu Panja Organisasi Internasional dan Panja *Open Government*, berkomitmen menempatkan ekonomi biru sebagai salah satu agenda prioritas yang akan terus disuarakan di berbagai forum multilateral parlemen dalam kerangka mendukung keanggotaan Indonesia di BRICS dan upaya akses OECD. Selanjutnya, BKSAP DPR mendorong keanggotaan Indonesia di berbagai organisasi internasional untuk membawa ekonomi biru sebagai misi penting mengingat Indonesia merupakan negara maritim besar yang ke depan akan memberikan keuntungan ekonomi yang berlimpah.

Pada tanggal 18 Maret 2025, BKSAP DPR dan ICCF mengadakan FGD dengan mengangkat tema "*Role on Supporting Indonesia's Membership in BRICS and Accession to OECD*" di Serpong. Acara ini dirancang untuk memberikan pengarah singkat dan mendalam mengenai konsep dan tujuan Buku Putih Ekonomi Biru yang akan datang, yang dipimpin oleh Kaukus Kelautan. Buku Putih Ekonomi Biru ini memposisikan Kaukus Kelautan sebagai badan parlemen terkemuka, yang mendorong pembangunan kelautan berkelanjutan

melalui kepemimpinan kebijakan, penetapan agenda, dan kepemimpinan pemikiran. Buku putih ini berfungsi sebagai gudang wawasan, data, dan rekomendasi, yang meningkatkan pemahaman anggota sekaligus mendorong kolaborasi lintas partai dan memperkuat aliansi politik. Buku putih ekonomi biru ini tidak akan menduplikasi peta jalan Indonesia yang sudah ada, melainkan akan meningkatkan, mengontekstualisasikan, dan mengoperasionalkan tujuannya dari perspektif legislatif dan pengawasan. Selain itu, buku putih ini akan berfungsi untuk memperkenalkan ICCF Indonesia, seperti misi, program, dan perannya sebagai Sekretariat Kaukus Kelautan di DPR-RI, kepada para pemangku kepentingan utama dari BKSAP DPR RI. Pada FGD ini juga disampaikan beberapa rencana untuk mengadakan diskusi kelompok yang terperinci mengenai tema-tema spesifik seperti prioritas legislatif, perikanan berkelanjutan, keterlibatan masyarakat, dan kawasan konservasi laut.



Acara ini merupakan kolaborasi BKSAP dengan ICCF dan dihadiri beberapa pakar dan juga anggota BKSAP yang masuk dalam keanggotaan Panja terkait. Pada

kesempatan tersebut dibahas secara detail peluang energi biru yang nyaris belum disentuh dan menjadi kebijakan pemerintah Indonesia. Indonesia dapat menerapkan kebijakan energi biru ini, mengingat potensinya bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meraih target 8% seperti yang ingin diraih Presiden Prabowo.

Prof. Rokhmin Damhuri, Menteri Kelautan dan Perikanan di era Presiden Abdurrahman Wahid, juga menambahkan informasi penting berkaitan potensi energi biru ini. Menurutnya, potensi lestari kelautan berupa hasil penangkapan ikan di perairan Indonesia bisa mencapai hingga 12 juta ton per tahun. konsep yang perlu diperhatikan juga adalah permasalahan *sustainability* dan industrialisasi untuk pengembangan energi biru di Indonesia.

“

---

Isu ekonomi biru semakin menjadi perhatian utama dalam diplomasi internasional, seiring meningkatnya tekanan terhadap ekosistem laut akibat eksploitasi berlebihan, polusi plastik, perubahan iklim, dan penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan.

”

---

Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Mardani Ali Sera, yang membuka FGD tersebut mengapresiasi keterlibatan Indonesia di berbagai forum internasional. Indonesia semakin mendapatkan pengakuan atas peran strategisnya dalam diskusi terkait ekonomi biru. Kehadiran delegasi Indonesia dalam acara COP 29 serta undangan yang diterima dari *World Water Forum* menunjukkan bahwa BKSAP DPR RI memiliki posisi

penting dalam diplomasi global yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi kelautan.

Pengakuan terhadap peran Indonesia dalam berbagai forum tersebut mencerminkan bahwa upaya yang dilakukan selama ini telah mendapatkan perhatian luas dari berbagai pihak di tingkat internasional. Hal ini juga sejalan dengan komitmen Indonesia untuk terus mengedepankan kerja sama antarnegara dalam mengoptimalkan sumber daya kelautan, baik dalam hal pemanfaatan yang bertanggung jawab maupun dalam memperkuat regulasi yang mendukung keberlanjutan ekosistem maritim. BKSAP juga kerap diundang di berbagai forum internasional, bahkan diminta sebagai pembicara aktif, seperti pada acara *World Water Forum* di Bali. Ini menunjukkan gerak parlemen kita sudah di jalan yang benar dan diakui oleh negara-negara lain.



Ketua Panja Organisasi Internasional, Ravindra Airlangga, yang berperan sebagai moderator di sesi kedua acara FGD tersebut menyampaikan bahwa dalam jangka waktu enam bulan, Panja ditargetkan untuk menyelesaikan seluruh pembahasan dan perumusan

kebijakan terkait ekonomi biru agar proses implementasinya dapat segera dilakukan secara efektif dan efisien tanpa membuang terlalu banyak waktu. Langkah ini tidak hanya berfokus pada sektor kelautan secara sempit, tetapi juga melibatkan berbagai komisi di DPR, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), serta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian agar kebijakan yang dihasilkan memiliki dampak lintas sektor yang lebih luas. Dengan pendekatan yang lebih terintegrasi, diharapkan upaya pengembangan ekonomi biru ini dapat menjadi solusi konkret dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, memperkuat industri maritim, serta mendukung ketahanan ekonomi nasional dalam jangka panjang.

“

---

Melalui kerja sama BKSAP DPR RI dan ICCF, Indonesia dapat memanfaatkan platform parlemen internasional untuk membangun konsensus, menginisiasi resolusi, dan memperkuat jejaring kerja sama lintas negara

”

Isu ekonomi biru semakin menjadi perhatian utama dalam diplomasi internasional, seiring meningkatnya tekanan terhadap ekosistem laut akibat eksploitasi berlebihan, polusi plastik, perubahan iklim, dan penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan. Laporan PBB terbaru menyebutkan bahwa lebih dari 30% stok ikan dunia telah dieksploitasi secara berlebihan, sementara sekitar 8 juta ton plastik masuk ke laut setiap tahunnya. Dalam konteks ini, komitmen Indonesia untuk mengembangkan ekonomi biru menempatkan negara ini sebagai salah satu aktor kunci dalam upaya global

mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 14 tentang Kehidupan di Bawah Air.

Melalui kerja sama BKSAP DPR RI dan ICCF, Indonesia dapat memanfaatkan platform parlemen internasional untuk membangun konsensus, menginisiasi resolusi, dan memperkuat jejaring kerja sama lintas negara. Kehadiran aktif di forum-forum seperti BRICS, OECD, dan berbagai forum kelautan internasional memberikan peluang strategis untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip keberlanjutan menjadi bagian integral dari kebijakan ekonomi global.

## **2. Focus Group Discussion dengan OECD Indonesia**

Pada tanggal 5 Mei 2025, Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI mengadakan rapat dengan delegasi *Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD) di Ruang Diplomasi, Gedung Nusantara III DPR RI. Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam rangka mendukung proses akses Indonesia menjadi anggota penuh OECD. Acara ini dihadiri oleh pimpinan dan anggota BKSAP DPR RI, delegasi OECD yang dipimpin oleh Dr. Alexander Boehmer dan Nathalie Limasson, serta pemangku kepentingan terkait yang memiliki peran strategis dalam proses harmonisasi kebijakan Indonesia dengan standar OECD.

Pertemuan diawali dengan sambutan Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Mardani Ali Sera, yang menyampaikan apresiasi atas kehadiran delegasi OECD serta menegaskan komitmen parlemen Indonesia dalam memperkuat hubungan kerja sama dengan OECD. Beliau menekankan bahwa dukungan parlemen tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga substantif, mencakup

proses legislasi, fungsi pengawasan, dan peran diplomasi internasional yang relevan untuk mempercepat akses Indonesia.

Dalam sesi paparan, Dr. Alexander Boehmer menjelaskan manfaat keanggotaan OECD yang bersifat teknis maupun strategis. OECD, melalui berbagai inisiatif seperti *Programme for International Student Assessment (PISA)*, telah berkontribusi dalam mendorong reformasi kebijakan pendidikan di banyak negara, termasuk Jerman, dan diharapkan memberikan dampak positif bagi Indonesia. OECD juga memiliki peran penting dalam menetapkan standar global di era digitalisasi dan kecerdasan buatan (AI), termasuk mendorong pedoman etis yang inklusif dan berorientasi pada kepentingan publik. Beliau juga menyoroti pentingnya peningkatan investasi dan daya saing industri manufaktur, serta keterlibatan OECD dalam *Investment Policy Reviews* untuk mendukung reformasi kebijakan investasi di Indonesia.



Delegasi OECD Indonesia saat pertemuan dengan Pimpinan BKSAP DPR RI di Gedung DPR RI, 5 Mei 2025

Sementara itu, Nathalie Limasson, Kepala Tim Akses Indonesia di OECD, memaparkan bahwa proses akses

yang dimulai pada tahun 2024 merupakan kelanjutan dari kerja sama sejak tahun 2007. Proses ini mencakup evaluasi menyeluruh terhadap kesesuaian kebijakan Indonesia dengan instrumen hukum dan praktik terbaik internasional di 25 komite tematik OECD. Menurut beliau, manfaat terbesar bukan hanya keanggotaan itu sendiri, melainkan reformasi kebijakan yang terjadi selama proses akses. Salah satu langkah awal yang menjadi perhatian adalah ratifikasi *Anti-Bribery Convention* sebagai bagian dari prasyarat OECD. Nathalie juga menekankan pentingnya keterlibatan parlemen dalam memprioritaskan rancangan undang-undang yang sejalan dengan rekomendasi OECD serta menjalin komunikasi efektif dengan semua fraksi di DPR.



Dari sisi parlemen, Ravindra Airlangga menegaskan bahwa akses OECD merupakan langkah strategis untuk mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045 dengan memperkuat reformasi nasional di berbagai bidang, termasuk ketenagakerjaan. Ia menyoroti pentingnya revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan untuk menyelaraskan sistem pelatihan vokasi dan

layanan ketenagakerjaan dengan standar OECD. Bramantyo Suwondo juga menambahkan pentingnya membangun konsensus internal dan transparansi informasi, serta membentuk Panja Organisasi Internasional di DPR untuk memperluas koordinasi lintas komisi. Sedangkan Muhammad Husein Fadlulloh menggarisbawahi perlunya memperkuat komunikasi internal parlemen agar seluruh 13 komisi memahami manfaat dan kewajiban keanggotaan OECD. Sementara itu, Irine Yusiana Roba Putri menekankan bahwa aspek politis sangat menentukan keberhasilan akses, dan kemauan politik menjadi kunci untuk memastikan bahwa keanggotaan OECD dapat memberikan manfaat nyata bagi bangsa.

“

Aspek politis sangat menentukan keberhasilan akses, dan kemauan politik menjadi kunci untuk memastikan bahwa keanggotaan OECD dapat memberikan manfaat nyata bagi bangsa

”

Diskusi menghasilkan kesepakatan untuk meningkatkan koordinasi antara DPR RI dan OECD, untuk selanjutnya dapat menyelenggarakan dialog teknis, memperkuat kapasitas anggota dan staf parlemen, serta mempercepat langkah-langkah legislasi yang mendukung proses akses. Target realistis yang disepakati adalah tercapainya keanggotaan penuh Indonesia dalam kurun tiga hingga empat tahun, dengan proses yang efektif, transparan, dan berdampak positif bagi masyarakat.

Pertemuan ini menjadi bukti keseriusan DPR RI dalam mengawal proses akses OECD, dengan membangun

sinergi antara lembaga legislatif, pemerintah, dan mitra internasional. Dengan komitmen politik yang kuat, koordinasi lintas sektor, serta dukungan teknis dari OECD, Indonesia berpeluang besar meraih keanggotaan penuh yang akan memperkuat pertumbuhan ekonomi, reformasi kebijakan publik, dan posisi strategis di kancah global.



Proses aksesi Indonesia ke OECD terjadi pada saat dunia menghadapi dinamika geopolitik, ekonomi, dan teknologi yang kompleks. OECD, sebagai forum negara-negara dengan standar tata kelola ekonomi tinggi, menawarkan peluang untuk mengintegrasikan Indonesia ke dalam ekosistem kebijakan publik global yang berbasis pada transparansi, akuntabilitas, dan inovasi. Bagi Indonesia, keanggotaan ini dapat meningkatkan kredibilitas internasional, menarik investasi berkualitas tinggi, dan memperluas akses ke pasar serta teknologi.

Dari sisi politik, keberhasilan aksesi sangat bergantung pada konsensus nasional lintas partai dan lembaga, serta kemauan politik yang kuat. Hal ini mencakup penyesuaian regulasi domestik, penguatan kapasitas

kelembagaan, dan penerapan standar internasional di berbagai sektor. Peran parlemen menjadi kunci, tidak hanya dalam fungsi legislasi tetapi juga dalam mengawasi implementasi dan menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan komitmen internasional.

Secara ekonomi, keanggotaan OECD diperkirakan dapat mendorong pertumbuhan PDB hingga 0,94%, dengan *multiplier effect* pada sektor perdagangan, investasi, pendidikan, dan teknologi. Reformasi kebijakan ketenagakerjaan, penerapan prinsip ESG, dan penguatan sektor manufaktur akan menjadi katalis penting bagi transformasi ekonomi Indonesia.

Dengan strategi yang terstruktur dan dukungan politik yang kuat, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi anggota penuh OECD dalam waktu 3 hingga 4 tahun. Keanggotaan ini diharapkan tidak hanya menjadi simbol prestise internasional, tetapi juga motor penggerak reformasi nasional menuju tata kelola yang lebih transparan, inklusif, dan berdaya saing global.

### **3. Focus Group Discussion dengan OECD Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, dan Kementerian Luar Negeri RI**

FGD yang diselenggarakan oleh BKSAP DPR RI bersama perwakilan OECD pada 26 Juni 2025 di Hotel Trembesi, Tangerang Selatan, merupakan bagian dari rangkaian konsolidasi nasional untuk mendukung proses akses Indonesia menjadi anggota penuh OECD. Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua Panja Organisasi Internasional, Ravindra Airlangga, yang sekaligus bertindak sebagai moderator diskusi. FGD dihadiri oleh anggota Panja Organisasi Internasional BKSAP,

perwakilan OECD di Jakarta, perwakilan Kementerian Luar Negeri, serta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Forum ini bertujuan membangun kesamaan pandangan dan menyusun langkah-langkah kolaborasi legislatif-eksekutif untuk mempercepat reformasi kebijakan dan harmonisasi regulasi yang diperlukan selama tahapan akses.

“

---

Akses ke OECD tidak semata urusan diplomasi antarpemerintah, tetapi merupakan strategi nasional untuk memperkuat tata kelola, mempercepat reformasi struktural, dan mendorong Indonesia keluar dari *middle-income trap*

”

Pada 3 Juni 2025, Pemerintah Indonesia melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian telah menyerahkan Initial Memorandum kepada Sekretaris Jenderal OECD, sebagai tonggak penting yang menandai dimulainya fase penilaian menyeluruh oleh komite-komite OECD. Sejalan dengan itu, BKSAP memfasilitasi dialog kebijakan untuk memastikan tersedianya dukungan politik lintas partai, kapasitas legislasi yang memadai, serta koordinasi antarlembaga agar proses akses berjalan efektif, kredibel, dan berorientasi pada manfaat publik.

Dalam paparan pembuka dijelaskan juga bahwa akses ke OECD tidak semata urusan diplomasi antarpemerintah, tetapi merupakan strategi nasional untuk memperkuat tata kelola, mempercepat reformasi struktural, dan mendorong Indonesia keluar dari *middle-income trap*. Perwakilan OECD, Massimo Geloso Grosso (Head of OECD Jakarta Office), menilai kualitas Initial Memorandum Indonesia sangat baik dan menjadi

landasan kokoh untuk memasuki tahapan tinjauan mendalam oleh 25–30 komite tematik. OECD memposisikan rekomendasi yang dihasilkan dari FGD ini sebagai bahan diskusi berbasis bukti guna mencari solusi jalan ke depan, bukan sekadar daftar kepatuhan administratif. Di sisi manfaat, aksesinya diyakini akan memperkuat daya tarik investasi, membuka akses pasar negara anggota, dan meningkatkan kualitas kebijakan publik melalui standarisasi praktik terbaik.



Dari sisi kebijakan luar negeri, Dirjen Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri, Tri Tharyat, menegaskan bahwa pilihan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS sekaligus mengajukan aksesinya OECD merupakan strategi yang saling melengkapi. Narasi yang mencoba mempertentangkan keduanya dinilai tidak tepat. Indonesia menjalankan politik luar negeri bebas aktif dan mengoptimalkan berbagai *platform* untuk memajukan kepentingan nasional. Tri Tharyat juga mengingatkan bahwa keputusan di OECD diambil melalui consensus. Karena itu, penguatan langkah domestik, termasuk dukungan politik parlemen, menjadi

faktor penentu. Pengalaman lintas negara menunjukkan durasi akses bervariasi (Latvia  $\pm 3$  tahun; Korea Selatan  $\pm 7$  tahun), sehingga konsistensi reformasi merupakan kuncinya.

Dari perspektif kebijakan ekonomi, Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Edi Prio Pambudi, menekankan bahwa tolak ukur kemajuan negara tidak hanya PDB, melainkan juga Indeks Pembangunan Manusia (HDI). Initial Memorandum Indonesia memuat *self-assessment* atas  $\pm 240$  standar dalam 32 bagian, melibatkan setidaknya 64 pemangku kepentingan termasuk DPR, kementerian/lembaga, dan masyarakat sipil. Pemerintah memperkirakan sekitar 95% ketentuan telah selaras. Sementara 5% sisanya membutuhkan dukungan legislatif, antara lain ratifikasi Anti-Bribery Convention (ABC), penyesuaian fiskal atas suap lintas batas, dan penguatan statistik resmi yang objektif. Untuk mengawal proses, disiapkan *matrix tracker* untuk memetakan kebutuhan amandemen regulasi dan memastikan masuk ke Prolegnas sesuai prioritas.



Suasana FGD Panitia Organisasi Internasional dengan OECD Indonesia

Beberapa isu strategis yang juga dibahas antara lain adalah mengenai:

- a. Pentingnya tata kelola dan integritas. Aksesinya menuntut penguatan kerangka anti-korupsi lintas sektor, mulai dari ratifikasi ABC, penyelarasan norma fiskal atas suap lintas batas, hingga peningkatan efektivitas pengawasan anggaran dan pengadaan. Peran DPR krusial dalam memastikan kualitas desain regulasi, penganggaran yang akuntabel, dan fungsi kontrol yang konsisten.
- b. Standar OECD di bidang investasi, persaingan usaha, pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, statistik, hingga kebijakan sosial menuntut koordinasi kebijakan yang kuat antarkementerian/lembaga. Penekanan pada HDI menuntut beberapa kebijakan yang dapat memperkuat layanan dasar (pendidikan dan kesehatan), pasar kerja yang inklusif, serta peningkatan produktivitas sektor manufaktur dan jasa bernilai tambah.
- c. Keputusan berbasis konsensus di OECD mengimplikasikan kebutuhan diplomasi yang proaktif dan sensitif. Kerangka bebas aktif Indonesia memungkinkan optimalisasi berbagai platform, seperti BRICS dan OECD, secara menyeluruh untuk kepentingan nasional, seraya menjaga konsistensi posisi dan komunikasi strategis kepada publik.

DPR RI diharapkan menjadi penggerak utama dalam prioritas legislasi yang diperlukan untuk pemenuhan standar OECD, penguatan fungsi pengawasan, termasuk *fact-finding mission* atas *self-assessment* pemerintah, dan juga komunikasi publik yang mendorong dukungan sosial. Dalam kerangka kerja

internal, BKSAP melalui Panja Organisasi Internasional memfasilitasi koordinasi lintas komisi (khususnya Komisi X untuk pendidikan, Komisi IX untuk ketenagakerjaan/kesehatan, dan komisi sektor ekonomi lainnya) agar proses berjalan sesuai agenda dan berjangka waktu jelas.

“

---

Keberhasilan proses akses sangat bergantung pada komitmen lintas sektor, keterlibatan aktif parlemen, dan penyelarasan regulasi dengan standar internasional, khususnya terkait anti-korupsi, tata kelola, dan peningkatan kualitas pendidikan serta kesejahteraan sosial.

”

---

FGD yang dipimpin oleh Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Ravindra Airlangga, berhasil mempertemukan berbagai pemangku kepentingan yang relevan dalam proses akses Indonesia ke OECD. Diskusi menegaskan bahwa akses OECD merupakan langkah strategis untuk meningkatkan posisi Indonesia di tingkat global, mempercepat reformasi struktural, dan meningkatkan daya saing nasional. Seluruh panelis sepakat bahwa keberhasilan proses akses sangat bergantung pada komitmen lintas sektor, keterlibatan aktif parlemen, dan penyelarasan regulasi dengan standar internasional, khususnya terkait anti-korupsi, tata kelola, dan peningkatan kualitas pendidikan serta kesejahteraan sosial.

Selain itu, diskusi juga menyoroti tantangan politik yang mungkin dihadapi Indonesia, termasuk isu pengakuan Israel yang berpotensi mempengaruhi proses penerimaan, serta perlunya membangun komunikasi

intensif antara DPR RI dan pemerintah dalam rangka harmonisasi kebijakan. Pihak OECD Indonesia menegaskan kembali bahwa agenda OECD berfokus pada tata kelola ekonomi dan sosial, bukan intervensi atas kebijakan politik luar negeri nasional. Merespons isu strategis, pihak OECD menekankan bahwa pengambilan keputusan kian terintegrasi dengan agenda sosial, termasuk kesetaraan gender dan inklusi.

Proses aksesi ini diakui akan memakan waktu dan membutuhkan kerja konsisten dari berbagai pihak, termasuk dukungan dari parlemen untuk penyelarasan peraturan perundangan dan penguatan sistem pengawasan. FGD ini menjadi langkah penting dalam memperkuat sinergi dan memperdalam pemahaman bersama menuju aksesi Indonesia ke OECD.

#### **4. Kunjungan kerja ke BP Batam dan Nongsa Digital Park**

Panja OI BKSAP DPR RI dibentuk untuk mengawal proses aksesi Indonesia menjadi anggota penuh OECD serta memperkuat peran keanggotaan Indonesia dalam BRICS. Kedua keanggotaan ini strategis untuk mendorong transformasi kebijakan domestik sekaligus mengamankan posisi Indonesia di tataran global sebagai negara ekonomi besar.

Dalam konteks tersebut, diperlukan pemahaman mendalam terhadap kesiapan institusi dan kawasan strategis di dalam negeri yang dapat mencerminkan kesesuaian dengan standar, nilai, dan prinsip OECD serta aspirasi kolaborasi Global South dalam BRICS. Panja OI BKSAP telah melakukan kunjungan ke Batam pada tanggal 1-3 Juli 2025. Salah satu kawasan yang relevan untuk dikaji di Batam adalah:

1. Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) sebagai institusi pengelola kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB), yang telah mengadopsi kebijakan reformasi kelembagaan, investasi, dan digitalisasi layanan publik.
2. Nongsa Digital Park (NDP) sebagai contoh pengembangan ekosistem ekonomi digital berbasis kolaborasi internasional dan pengembangan talenta lokal, yang mendapat pengakuan dari pemerintah pusat sebagai Kawasan Ekonomi Khusus Digital (KEK Digital).

Batam menunjukkan potensi strategis melalui perannya sebagai KEK dan zona perdagangan bebas dekat Singapura. Sebagai pusat manufaktur, penghubung logistik, dan pengembangan infrastruktur digital, Batam memperlihatkan kesiapan struktural dan kelembagaan yang relevan untuk mendukung standar OECD dan kolaborasi global seperti dalam BRICS.

Sebagai manifestasi dari fungsi DPR RI dalam pengawasan dan diplomasi parlemen, Panja OI memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses akses Indonesia ke OECD dan partisipasi aktif dalam BRICS tidak hanya bersifat simbolik, melainkan berbasis kesiapan institusional di dalam negeri dan selaras dengan kepentingan nasional. Kunjungan ini diharapkan menjadi instrumen pengawasan berbasis bukti (*evidence-based oversight*) sekaligus dapat memperkuat fungsi diplomasi parlemen.

#### 1. **Pertemuan dengan BP Batam**

Batam dipilih karena perannya sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), pusat manufaktur, hub logistik internasional, serta pengembangan ekosistem

ekonomi digital melalui Nongsa Digital Park (NDP) yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Digital. Kunjungan ini bertujuan menggali informasi terkait peran strategis Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) dalam perdagangan internasional, investasi, dan reformasi tata kelola; memetakan peluang serta tantangan Batam dalam menyesuaikan diri dengan standar OECD; serta mengidentifikasi kontribusi Batam dalam memperkuat posisi Indonesia di BRICS melalui pengembangan ekonomi digital, inovasi, dan konektivitas global.



Pertemuan berlangsung di kantor BP Batam dan diawali oleh sambutan dari Fary Djemi Francis selaku Deputy Bidang Investasi dan Pengusahaan BP Batam. Fary Francis memaparkan presentasi berjudul “Mewujudkan Batam sebagai Pusat Investasi Global”, yang menjelaskan langkah strategis BP Batam dalam mendorong Batam menjadi destinasi investasi internasional. Strategi ini meliputi penyederhanaan regulasi dan perizinan berbasis risiko, penyetaraan insentif antara *Free*

*Trade Zone* (FTZ) dan KEK, peningkatan transparansi layanan publik, serta penguatan koordinasi multi-pihak. BP Batam menargetkan proyeksi investasi sebesar Rp304,9 triliun pada periode 2025–2029, dengan fokus pada penanaman modal asing dari negara-negara strategis seperti Tiongkok dan Singapura. Dukungan infrastruktur menjadi prioritas, termasuk pengembangan pelabuhan, bandara, jembatan penghubung antar-pulau, serta inovasi energi hijau melalui PLTS apung dan *Battery Energy Storage System* (BESS). Kawasan strategis seperti KEK Nongsa Digital Park dan KEK Batam Aero Technic juga menjadi bagian integral dari visi tersebut. Berbagai tantangan, seperti ketersediaan SDM vokasi dan harga energi, direspons melalui inovasi kelembagaan seperti pembentukan Desk Percepatan Investasi, Tim Koordinasi Vokasi, dan penunjukan Duta Investasi Batam.



Dalam sesi tanggapan, Ravindra Airlangga selaku Ketua Panja OI menekankan pentingnya memastikan regulasi yang menjamin independensi

data, termasuk revisi UU Statistik agar sesuai dengan rekomendasi OECD terkait Badan Statistik Nasional untuk memperkuat independensi kelembagaan. Ia mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Batam yang konsisten di atas rata-rata nasional dan bahkan melampaui standar pertumbuhan negara OECD. Ravindra juga mendorong BP Batam untuk berbagi praktik baik, khususnya keberhasilan di sektor energi hijau yang telah dimanfaatkan oleh Singapura. Rahayu Saraswati D. Djohadikusumo menggarisbawahi permasalahan pertanahan di Batam yang memerlukan penanganan sistematis dan transparan guna memberikan kepastian bagi investor. Ia juga menyoroti persoalan pekerja migran non-profesional yang dapat mempengaruhi stabilitas sosial dan ketenagakerjaan, serta mendorong pengembangan tenaga kerja lokal yang memiliki keahlian dan juga berdaya saing.

“

---

Reformasi regulasi, penguatan kapasitas SDM, integrasi kebijakan pusat dan daerah, serta transparansi tata kelola merupakan elemen kunci dalam memaksimalkan manfaat keanggotaan di OECD dan BRICS.

”

---

Arzeti Bilbina Setyawan menegaskan bahwa Indonesia harus menjadi pemain aktif dalam arus investasi dan inovasi global, bukan hanya pasar. Ia menilai capaian pembangunan BP Batam patut dijadikan role model nasional, dengan Batam sebagai pusat inovasi nasional dan simpul kerja sama ekonomi internasional berbasis teknologi.

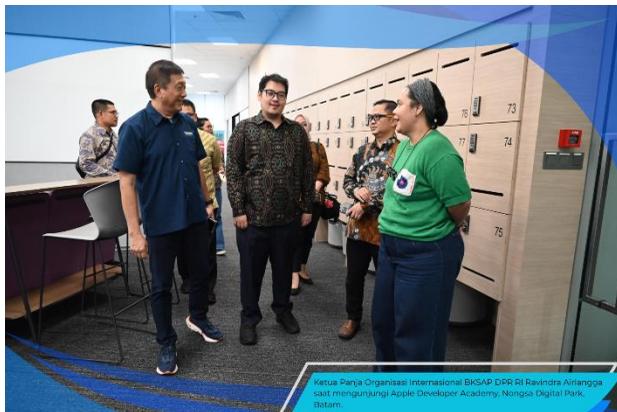
Dewi Coryati menekankan pentingnya alih teknologi dalam setiap investasi yang masuk, serta mengintegrasikan pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri, mencontoh praktik Jerman yang berhasil menghubungkan pendidikan menengah dengan dunia kerja melalui skema *match and link*. Sementara itu, Hillary Brigitta Lasut mengingatkan perlunya evaluasi atas insentif yang diberikan kepada investor untuk menilai dampaknya terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan nilai tambah, dan kontribusi terhadap ekonomi lokal.

Batam memiliki modal strategis yang signifikan untuk mendukung akses Indonesia ke OECD dan memperkuat posisi dalam BRICS. Reformasi regulasi, penguatan kapasitas SDM, integrasi kebijakan pusat dan daerah, serta transparansi tata kelola merupakan elemen kunci dalam memaksimalkan manfaat keanggotaan di kedua forum internasional tersebut. Hasil pertemuan ini memberikan masukan penting bagi Panja OI dalam menjalankan fungsi pengawasan berbasis bukti (*evidence-based oversight*) dan diplomasi parlemen, sekaligus menjadi referensi dalam perumusan langkah strategis berikutnya, termasuk penyusunan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat daya saing nasional di tingkat global.

## 2. Kunjungan ke Nongsa Digital Park

NDP dirancang sebagai simpul tempat yang mempertemukan pendidikan, industri kreatif, pusat inovasi, dan perusahaan teknologi lintas negara, sehingga transfer pengetahuan berlangsung lebih cepat, jejaring pasar meluas, dan penciptaan nilai

tambah berlangsung di dalam negeri. Pembahasan awal difokuskan pada kontribusi NDP terhadap pengembangan ekonomi digital nasional serta potensinya dalam menguatkan jejaring BRICS, khususnya peluang kemitraan teknologi dan pertukaran talenta dengan India dan Tiongkok. Anggota Panja menekankan bahwa dukungan terhadap transformasi digital nasional membutuhkan keterhubungan yang erat antara pusat inovasi seperti NDP dengan kebijakan pemerintah pusat dan daerah, agar dampak ekonomi dan sosial terasa nyata hingga ke level industri kecil dan menengah.



Diskusi kemudian diarahkan pada beberapa fokus utama. Pertama adalah pengembangan talenta digital dan inklusi ekonomi digital. Panja OI mendorong adanya perluasan akses pelatihan yang relevan, kurikulum vokasi yang adaptif, serta skema penempatan kerja yang transparan dan berkelanjutan bagi lulusan baru maupun pekerja alih-profesi. Kedua adalah kerja sama teknologi dan penguatan ekosistem startup lintas negara melalui skema kolaboratif seperti joint venture, exchange

program, dan inkubasi bersama yang memanfaatkan kapasitas riset, penggunaan cloud, dan jaringan mentor internasional. Ketiga adalah keamanan data dan tata kelola digital.

Panja OI menegaskan pentingnya penerapan prinsip-prinsip data governance setara standar global yang mencakup privasi, keamanan siber, interoperabilitas, dan akuntabilitas algoritmik, agar ekosistem digital Indonesia dapat dipercaya oleh mitra internasional dan sejalan dengan ekspektasi OECD. Keempat adalah model kemitraan “pusat–daerah–swasta–investor asing” yang memungkinkan adanya praktik terbaik NDP ke kawasan lain, dengan tetap memastikan kepatuhan pada regulasi nasional serta perlindungan kepentingan publik. Rangkaian pertanyaan kunci yang dibahas mencakup sejauh mana kontribusi NDP terhadap ekonomi digital nasional dan jembatan ke pasar BRICS, bagaimana standar tata kelola data dan keamanan digital diimplementasikan, seperti apa skema kerja sama internasional dan program pelatihan disusun, serta bagaimana NDP sebagai model KEK Digital dapat menjadi contoh kesiapan Indonesia untuk standar OECD sekaligus memperluas jejaring kolaborasi di BRICS.

“

KEK Nongsa tidak hanya menawarkan iklim usaha yang kompetitif, namun juga menghadirkan model kolaborasi pendidikan, industri dan inovasi yang menghasilkan talenta unggul dan nilai tambah domestik secara berkelanjutan.

”

Untuk memperoleh gambaran yang lebih konkret, delegasi Panja OI melakukan peninjauan fisik di area NDP guna melihat perkembangan kawasan dan infrastruktur penunjang. Delegasi melakukan tur kunjungan dengan penjelasan mengenai rencana pengembangan yang menempatkan NDP sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi dan teknologi di Indonesia. Rangkaian kunjungan dilanjutkan ke sejumlah institusi strategis dan perusahaan berbasis teknologi tinggi. Di Apple Developer Academy, delegasi mendapatkan penjelasan mengenai program pelatihan intensif pengembangan aplikasi dengan pendekatan berbasis proyek, desain yang berpusat pada pengguna, serta praktik kewirausahaan digital yang menyiapkan peserta agar siap kerja dan kompetitif di pasar global. Fasilitas pelatihan bersertifikasi yang didukung oleh Dell ditinjau sebagai penguat ekosistem kompetensi teknis, menopang kebutuhan industri perangkat keras maupun perangkat lunak tingkat lanjut. Di sektor ekonomi kreatif, delegasi meninjau *Infinite Frameworks Studios*, yaitu studio animasi dan konten digital bertaraf dunia yang berperan sebagai pionir dalam memadukan produksi kreatif dengan penyerapan tenaga kerja lokal serta keterlibatan UMKM setempat.

Penyerapan tenaga kerja dari lulusan Apple Developer Academy di bidang *fullstack web development* dan *UI/UX* tercatat mencapai 80%, jauh lebih tinggi dibandingkan tingkat penyerapan lulusan SMK pada umumnya di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa *vocational training* yang berorientasi pada kebutuhan industri memiliki potensi penting untuk meningkatkan akses

pekerjaan, sekaligus memperlihatkan bahwa KEK Nongsa tidak hanya menawarkan iklim usaha yang kompetitif, namun juga menghadirkan model kolaborasi pendidikan, industri dan inovasi yang menghasilkan talenta unggul dan nilai tambah domestik secara berkelanjutan.



Dalam kunjungan ini, Panja OI menilai bahwa peran NDP sebagai katalis transformasi digital nasional akan semakin kuat bila tata kelola data diterapkan secara konsisten sesuai standar global. Penerapan prinsip privasi, keamanan, dan proses pengambilan data perlu diikuti dengan dukungan regulasi yang memadai, mekanisme audit independen, serta penguatan kapasitas teknis pengelola dan mitra usaha. Dalam kacamata OECD, hal ini berkaitan erat dengan kualitas regulasi, integritas pasar, dan keterukuran kebijakan; sedangkan dalam jejaring BRICS, kepercayaan lintas yurisdiksi perlu dibangun melalui transparansi, kesesuaian standar, dan penghormatan terhadap kedaulatan data. Komplementaritas dua ekosistem kerja sama tersebut dipandang sebagai peluang untuk

memperluas pasar, menarik investasi teknologi, serta mempercepat alih pengetahuan tanpa mengorbankan kepentingan nasional.

Kunjungan ini turut memunculkan pelajaran lintas kawasan dari temuan di BP Batam. Panja OI kembali menegaskan pentingnya tata kelola lahan yang transparan, termasuk akses publik terhadap data perizinan, pembaruan spasial, dan status hak, sebagai prasyarat untuk memperkuat kepercayaan investor dan meminimalkan risiko hukum yang dapat menghambat skala proyek digital. Evaluasi berkala atas efektivitas insentif fiskal dan nonfiskal juga dipandang perlu agar setiap kelonggaran dari sebuah kebijakan, diukur kontribusinya terhadap penciptaan lapangan kerja, produktivitas, dan nilai tambah lokal. Dalam dimensi pengembangan SDM, Panja OI mendorong model *'match and link'* yang menghubungkan pendidikan menengah-kejuruan dan perguruan tinggi dengan kebutuhan industri; dengan demikian, terbentuk pipeline talenta digital yang sejak dini mendapatkan kurikulum adaptif, sertifikasi diakui industri, serta paparan internasional melalui program pertukaran dan magang lintas negara.

“

---

NDP telah menunjukkan kesiapan sebagai ekosistem digital yang menjanjikan dan relevan untuk menjadi studi kasus Indonesia dalam proses aksesi OECD sekaligus penguatan posisi di BRICS

”

Berdasarkan rangkaian peninjauan dan diskusi, Panja OI menyimpulkan bahwa KEK Nongsa,

khususnya NDP, telah menunjukkan kesiapan sebagai ekosistem digital yang menjanjikan dan relevan untuk menjadi studi kasus Indonesia dalam proses aksesi OECD sekaligus penguatan posisi di BRICS. Ke depan, Panja OI merekomendasikan agar tata kelola data dan keamanan siber diperkuat sebagai bukti komitmen terhadap standar global; hubungan antara kemitraan pusat, daerah, swasta dan investor asing dapat ditata dengan kerangka kepastian hukum yang jelas dan akuntabel; program pelatihan dan penempatan diperluas dengan target peningkatan talenta tersertifikasi; serta skema pembiayaan inovatif bagi startup dan UMKM teknologi lokal dikembangkan untuk mendorong skalabilitas.

Panja OI juga mendorong agar pemerintah dan pemangku kepentingan terkait menyiapkan mekanisme evaluasi terukur atas insentif dan program kemitraan yang berbasis data dan dampak, sehingga setiap kebijakan dapat ditinjau secara periodik sesuai prinsip *evidence-based policymaking*.



Panja OI juga memandang penguatan peran Batam sebagai hub kolaborasi *Global South* dapat diwujudkan melalui proyek bersama BRICS di bidang riset, pertukaran talenta digital, dan produksi konten kreatif, dengan NDP sebagai etalase keunggulan Indonesia yang mempertemukan standar OECD dengan aspirasi kolaboratif BRICS secara konstruktif dan saling melengkapi.

Kunjungan kerja Panja Organisasi Internasional BKSAP DPR RI ke BP Batam dan KEK Nongsa memberikan gambaran komprehensif mengenai kesiapan Batam sebagai pusat pertumbuhan investasi dan inovasi global yang selaras dengan agenda reformasi nasional dalam kerangka akses OECD dan penguatan posisi Indonesia di BRICS.

Di BP Batam, Panja OI mencatat bahwa institusi ini telah melakukan berbagai inovasi kelembagaan, penyederhanaan regulasi, serta mendorong transformasi ekonomi kawasan berbasis investasi hijau dan digital. Pertumbuhan ekonomi Batam yang konsisten melampaui rata-rata nasional serta tingginya minat penanaman modal asing menunjukkan daya tarik Batam yang strategis. Namun demikian, sejumlah tantangan masih perlu ditangani, seperti persoalan pertanahan, kesiapan SDM vokasi, dan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas insentif investasi.

“

Reformasi tata kelola lahan dan transparansi menjadi prasyarat penting akses Indonesia ke  
OECD

”

Kunjungan ke KEK Nongsa menunjukkan bahwa kawasan ini telah tumbuh menjadi ekosistem digital yang menjanjikan. Kunjungan ke Apple Developer Academy, pelatihan bersertifikasi yang disponsori oleh Dell, serta Infinite Frameworks Studios memperlihatkan kuatnya sinergi antara pendidikan, industri, dan inovasi. KEK Nongsa telah menjadi contoh nyata kolaborasi sektor publik dan swasta dalam mendorong talenta digital, ekonomi kreatif, dan integrasi teknologi dalam pembangunan nasional.

Reformasi tata kelola lahan dan transparansi menjadi prasyarat penting akses Indonesia ke OECD, termasuk penyelesaian persoalan pertanahan di Batam untuk menjamin kepastian hukum, keterbukaan data, dan perlindungan investor. Kebijakan insentif fiskal maupun non-fiskal perlu dievaluasi berbasis data secara berkala agar dampaknya terhadap lapangan kerja, produktivitas, dan nilai tambah lokal terukur. Investasi juga harus mendorong alih teknologi dan pengembangan SDM lokal melalui keterhubungan pendidikan-industri, diperkuat dengan pemanfaatan KEK digital seperti Nongsa yang mencerminkan komitmen Indonesia pada transformasi ekonomi digital dan inklusi teknologi sesuai prinsip OECD, serta kerja sama dengan mitra BRICS. Selain itu, penataan migrasi tenaga kerja non-profesional harus mengedepankan perlindungan sosial dan penguatan kapasitas lokal untuk menjaga stabilitas. Batam dapat diarahkan menjadi hub dari Global South melalui pusat inovasi, logistic, riset Bersama, dan pertukaran talenta digital dalam kerangka BRICS.



# FOTO DOKUMENTASI







## Partisipasi DPR RI pada BRICS+ Parliamentary Meeting







# FGD Panja Ol dengan ICCF





# FGD Panja Ol dengan OECD Indonesia





## FGD Panja OI dengan OECD Indonesia, Kemeko Perekonomian dan Kemlu RI









@bksapdpr



@bksapdpr



bksapdpr



bksapdpr



Produced by:

**COMMITTEE FOR INTER-PARLIAMENTARY  
COOPERATION  
INDONESIAN HOUSE OF  
REPRESENTATIVES  
(BKSAP DPR RI)**

Email: [biro\\_ksap@dpr.go.id](mailto:biro_ksap@dpr.go.id)

Phone: (62-21) 5715813

[ksap.dpr.go.id](http://ksap.dpr.go.id)